

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia, tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara.

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mendorong adanya desentralisasi penyelenggara pemerintah daerah, desentralisasi ini menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri secara otonom.

Adanya desentralisasi pengelolaan pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, memaksa pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, ekonomis, efektif, dan efisien untuk masyarakat.

Menurut Hansen dan Mowen (2014: 552), partisipasi anggaran adalah pendekatan penganggaran yang memungkinkan para manajer yang akan bertanggungjawab atas kinerja anggaran, untuk berpartisipasi dalam

pengembangan anggaran, partisipasi anggaran megkomunikasikan rasa tanggung jawab pada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreatifitas.

Akuntansi pertanggungjawaban memainkan peran dalam mengukur kegiatan dan hasilnya termasuk dalam pelaksanaan anggaran yang telah disusun dengan pusat pertanggungjawaban lainnya. Menurut Arfan Ikhsan (2017), akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban yang meliputi pendapatan, serta biaya-biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban.

Menurut Goodhue (1995) dalam Eka Nur Yunita (2011), teknologi informasi adalah teknologi sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk membantu menyelesaikan tugas mereka. Penggunaan teknologi informasi merupakan istilah dari sistem informasi akuntansi yang menyajikan informasi kepada para pengguna. Melalui partisipi anggaran manajer akan lebih memahami kondisi instansi yang sebenarnya karena adanya keterlibatan bawahan yang secara langsung terjun langsung dalam penyusunan anggaran. Melalui akuntansi pertanggungjawaban dan teknologi informasi yang berkembang saat ini, melalui akuntansi pertanggungjawaban, setiap devisi atau unit pertanggungjawaban atas biaya yang dikeluarkannya, dengan demikian, manajer dapat mengetahui sumber dan informasi dari mana biaya tersebut berasal. Selain itu dengan didukung oleh teknologi informasi yang canggih, manajemen dapat melakukan pengendalian dan mendapatkan informasi dengan cepat, tepat dan akurat sebagai dasar pengambilan

keputusan. Teknologi informasi juga mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan instansi pemerintah dalam penyusunan anggaran.

Pembahasan yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini dibatasi yaitu bagaimana pengaruh partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan teknologi informasi terhadap kinerja pegawai dapat menunjang terlaksananya peningkatan efektifitas dan efisiensi organisasi dan dapat meningkatkan kinerja bagi publik. Di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo merupakan dinas pemerintah yang bergerak di bidang pertanian. Peningkatan kinerja dinas tersebut, baik kinerja manajemen maupun kualitas pelayanan tetap menjadi hal penting yang harus ditingkatkan terutama dalam bidang keuangan, akuntansi pertanggungjawaban, teknologi informasi dan kinerja pegawai untuk menjaga eksistensi Dinas tersebut. Partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan teknologi informasi merupakan tiga unsur penting dalam penyusunan anggaran karena dengan adanya tiga unsur tersebut yang efektif, maka akan timbul usaha untuk mencapai target yang telah direncanakan maka dapat tercapai kinerja yang efisien dan efektif.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Beby Natalya dan Dwi Risma Dewiyanti Annisa Kusumawardani (2016), yang meneliti pengaruh partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja pegawai berpengaruh secara persial dan simultan terhadap kinerja pegawai. Hal ini didasari dari isi kesimpulan yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban adalah searah dengan kinerja pegawai dengan

kata lain partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban yang baik/tinggi berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Namun fakta di lapangan menunjukkan banyak terjadi kasus yang menyebabkan penurunan pendapatan petani, Padi dan jagung adalah produksi dan produktivitas unggulan di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Menurut Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo selama lima tahun produk dan produktivitas padi dan jagung mengalami penurunan disebabkan oleh adanya peningkatan intensitas kejadian iklim ekstrim yang mengakibatkan pergeseran pola tanam dan peningkatan serangan organisme pengganggu tanaman (Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, 2020).

Margin atau keuntungan usaha tani tanaman pangan yang relatif rendah, mengakibatkan keberhasilan capaian peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan tidak serta merta selalui diikuti oleh peningkatan pendapatan petani yang signifikan. Pengembangan komoditas potensial baik hortikultura maupun rumah tangga petani sekaligus upaya konservasi dan optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan kurang produktif (Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, 2020).

Berdasarkan riset gap yang terjadi antara teori dan fonemena diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh antara partisipasi anggaran, akuntansi peranggungjawaban dan teknologi informasi terhadap kinerja pegawai. Alasan peneliti mengambil variabel partisipasi anggaran karena peneliti ingin mengetahui apakah jika penelitian mengenai partisipasi

anggaran dilakukan pada Dinas pemerintahan akan berpengaruh positif secara persial dan simultan juga. akuntansi pertanggungjwaban teknologi informasi dipilih sebagai variabel kedua dan ke tiga karena peneliti ingin mengetahui apakah jika penelitian dilakukan pada dinas pemerintahan akan berpengaruh positif secara persial dan simultan juga. Penelitian ini melibatkan responden dari aparatur sipil negara pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Alasan memilih penelitian di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo karena Dinas tersebut merupakan Dinas pemerintahan yang bergerak dibidang jasa dan pelayanan masyarakat dibidang pertanian, walaupun menjadi satu-satunya dinas yang bergerak dalam pelayanan dibidang pertanian dikabupaten ponorogo, namun peningkatan kinerja Dinas tersebut, baik kinerja manajemen maupun kualitas pelayanan tetap menjadi hal penting yang harus ditingkatkan, terutama dalam bidang keuangan, akuntansi, teknologi, dan kinerja pegawai untuk menjaga eksistensi Dinas tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo ?
- b. Apakah akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo ?
- c. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo ?
- d. Apakah partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
- b. Mengetahui pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
- c. Mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.

- d. Mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan teknologi informasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat guna untuk menambah pengetahuan khususnya tentang akuntansi pertanggung jawaban sebagai bahan kajian dalam penelitian serta dapat pula dijadikan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil penelitian lebih sempurna dan akurat.

- b. Bagi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.

Dengan diadakannya penelitian ini, memberikan referensi apakah ada pengaruh partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan teknologi informasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.

- c. Bagi Peneliti

Dapat membandingkan fenomena-fenomena yang ada di instansi yang diteliti dan dapat memperoleh pengetahuan atau pengalaman yang lebih luas setelah melakukan penelitian.

d. Bagi penelitian yang akan datang

Memberikan wawasan baru dan pengetahuan yang yang dijadikan acuan untuk membuat skripsi berikutnya khususnya mata kuliah akuntansi pertanggungjawaban tentang partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan teknologi informasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pertanian, Ketahanan pangan Dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

